

BAB II
SEJARAH DAN PROSES ALBANIA MENJADI NEGARA
KANDIDAT UNI EROPA

Sebelum menjadi negara kandidat Uni Eropa, Albania memiliki proses yang cukup panjang. Hubungan Albania dan Uni Eropa dimulai sejak tahun 2004. Keinginan Albania menjadi anggota Uni Eropa didorong oleh masa lalu Albania yang menganut komunis sehingga selama 46 tahun Albania menutup negaranya dari dunia internasional. Kebijakan tersebut membuat perekonomian Albania jatuh hingga menjadi salah satu negara miskin di Eropa. Usaha yang dilakukan Albania untuk memperbaiki hal tersebut yaitu dengan bergabung dengan Uni Eropa. Pada bab ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai kondisi Albania pada era komunisme, pasca komunisme dan bagaimana proses Albania menjadi kandidat Uni Eropa.

2.1 Terjadinya Krisis Pengungsi di Eropa

Perang sipil yang terjadi karena pemberontakkan terhadap rezim Assad mencapai tahap yang semakin mengkhawatirkan. Perang semakin bertambah parah karena pemerintah menggunakan senjata konvensional dan senjata kimia untuk melawan kelompok oposisi yang ingin menurunkan rezimnya.³⁵ Hingga kemudian masyarakat Suriah memutuskan untuk mengungsi ke negara lain. Hal

³⁵Fahham A Adam, Kartaatmaaja A.M., 2014, *Konflik suriah dan Akar Permasalahannya*, Politica Vol.5 No.1

ini dikarenakan kondisi yang semakin pelik, sehingga masyarakat Suriah kemudian meninggalkan tanah air mereka untuk menghindari konflik yang terjadi. Bukan hanya warga Suriah yang terpaksa mengungsi, tetapi perang tersebut juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri bagi negara-negara sekitarnya. Menurut data yang diperoleh per 1 April 2014, sekitar 6,5 juta warga Suriah sudah meninggalkan kediaman mereka akibat konflik berkepanjangan tersebut. Sejak Maret 2011, sebanyak 2,7 juta warga Suriah atau sekitar 10 dari % total populasi di negara tersebut sudah mengungsi ke negara-negara tetangganya. Pada akhir tahun 2014, jumlah pengungsi Suriah mencapai 4,1 juta jiwa.³⁶

Menurut Malcom Proudfoot seorang ahli Sosiologi dalam bukunya *European Refugees: 1939–1952; A Study in Forced Population Movement*, pengungsi merupakan suatu kelompok orang-orang yang terpaksa harus pindah ke tempat lain yang dirasa lebih aman akibat adanya penganiyaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa. Sehingga perpindahan yang mereka lakukan bukan semata-mata kehendak mereka, melainkan suatu hal yang mendesak mereka yang harus mereka lakukan untuk melindungi keselamatan jiwa mereka.³⁷ Dalam hal ini, pengungsi dari Suriah tersebut berpindah ke negara-negara sekitarnya yaitu negara-negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Swedia dan lain-lain.³⁸

³⁶*Ibid.*

³⁷Sudut Hukum, *Pengertian Pengungsi Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://www.suduthukum.com/2017/02/pengertian-pengungsi-menurut-para-ahli.html> pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 20.15

³⁸Jurnal Islam, 2015, *Eropa Siap Terima Tambahan 120.000 Pengungsi Lagi*, Diakses dari <https://jurnalislam.com/eropa-siap-terima-tambahan-120-000-pengungsi-lagi/> Pukul 20.20

Selain negara-negara tujuan seperti Jerman, Perancis atau Swedia, adapun juga negara transit yaitu negara-negara di Eropa Tenggara seperti Yunani, Albania, Bulgaria dan lain-lain. Negara-negara transit merupakan negara perantara bagi pengungsi sebelum mereka tiba di negara tujuan. Negara-negara transit ini akan menampung para pengungsi di negara mereka. Alasan pengungsi memilih Eropa sebagai rumah baru mereka karena perekonomian negara-negara di Eropa yang baik, adanya perlindungan terhadap pengungsi, serta terbukanya masyarakat terhadap pengungsi yang datang. Sedangkan negara-negara Timur Tengah justru menerima lebih sedikit pengungsi, contohnya seperti Arab Saudi. Menurut pengamat Timur Tengah dari *The Middle East Institute*, Zuhairi Misrawi mengatakan bahwa negara-negara Arab memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit sehingga sulit untuk menerima pengungsi yang jumlahnya mencapai jutaan. Selain itu, negara Arab memang tidak punya budaya menerima pengungsi. Dalam sejarah, mereka hanya pernah menerima pengungsi dari Palestina yang berjumlah hingga jutaan. Ini dikarenakan di negara-negara Arab terjadi pergolakan antara Sunni dan Syiah sering terjadi, sehingga pengungsi dari Suriah yang beraliran Syiah menjadi enggan untuk berpindah ke negara-negara Arab dan lebih memilih negara-negara Eropa.³⁹

Sebagai negara-negara transit, negara-negara di Eropa Tenggara ini juga mendapatkan beban untuk menerima pengungsi yang nantinya akan menuju Jerman atau Perancis. Namun karena banyaknya pengungsi yang semakin tak terkendali, beberapa dari negara-negara ini akhirnya menetapkan kebijakan untuk

³⁹Hanna Azarya Samosir, *Mengapa Imigran ke Eropa, Bukan ke Timur Tengah?*, dikases dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324/mengapa-imigran-ke-eropa-bukan-ke-timur-tengah/pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 21.00>

menutup perbatasannya sehingga pengungsi tidak dapat melewatinya. Contohnya saja seperti Hungaria dengan alasan bahwa pengungsi akan menyebabkan maraknya terorisme di negara tersebut. Menurut Perdana Menteri Hungaria Victor Orban, tidak ada alasan bagi Hungaria untuk menerima setiap imigran atau pengungsi karena kondisi ekonomi dan demografi akan lebih baik tanpa imigran atau pengungsi.⁴⁰

Krisis pengungsi Eropa bermula pada tahun 2014, berawal dari meningkatnya jumlah pengungsi yang ingin mencari suaka di Eropa, baik melalui Laut Mediterania maupun menyeberangi wilayah Turki. Kebanyakan pengungsi berasal dari daerah dengan kondisi perpolitikan yang tidak stabil seperti Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika dan negara-negara di Semenanjung Balkan. Jumlah pengungsi yang ingin mencari suaka ke Eropa semakin hari semakin membengkak. Menurut UNHCR, jumlah pencari suaka ke Eropa yang masuk melalui Laut Mediterania hingga tahun 2015 mencapai 1.000.573 jiwa dan setengahnya merupakan pengungsi dari Suriah sebanyak 71%, Afghanistan 21% dan 8% dari Iraq.⁴¹

Kemudian pada April 2015 terjadi peristiwa tenggelamnya lima kapal yang mengangkut lebih kurang 2.000 orang pengungsi yang ingin ke Eropa tenggelam di Laut Mediterania dan mengakibatkan kematian lebih dari 1.200 pengungsi. Kemudian sepanjang tahun tersebut, semakin banyak pengungsi yang

⁴⁰Sindo News, *PM Hungaria Menyebut Pengungsi sebagai Racun*, Diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1126785/41/pm-hungaria-menyebut-pengungsi-sebagai-racun-1469640029> pukul 21.40

⁴¹ ABC News, *More Than 1 Million Asylum seeker reached Europe By Sea In 2015*. Diakses dari <http://www.abc.net.au/news/2015-12-30/more-than-1-million-asylum-seekers-reached-europe-by-sea-in-2015/7060012>, Pada tanggal 20 April 2017 pukul 20.30

mulai memasuki Eropa baik melalui jalur laut maupun darat.⁴² Jalur darat yang dilalui pengungsi yaitu dari Suriah mereka menuju Yunani, kemudian melalui Macedonia, Serbia, Hungaria kemudian Austria dan menuju Jerman, Perancis dan Swedia.⁴³

Gambar 2.1 Rute Pengungsi Suriah Menuju Jerman Sebelum Penutupan Perbatasan oleh Negara-Negara Transit



Sumber : www.independent.co.uk

Uni Eropa seperti yang kita ketahui merupakan negara yang terikat dengan perjanjian *Schengen* tahun 1985 yang menghapus pemeriksaan di perbatasan dan menjamin pergerakan bebas baik lokal maupun asing. Ketidakmampuan negara-negara UE untuk mengontrol perbatasan akibat arus migran yang luar biasa semakin menyulitkan negara-negara anggota.⁴⁴ Negara-negara Uni Eropa dari

⁴²*Ibid.*

⁴³Independent News, *6 Charts and a Map That Show Where Europe's Refugees are Coming From - and The Perilous Journeys They Are Taken*, diakses dari <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-six-charts-that-show-where-refugees-are-coming-from-where-they-are-going-and-how-they-10482415.html>

⁴⁴Humphrey Wangke, *Krisis Migran Dan Masa depan Uni Eropa*, Vol. VIII, No. 03/I/P3DI/Februari/2016, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 5

kawasan Eropa Timur awalnya menolak mengambil bagian dari pendistribusian 120.000 migran, tapi kemudian mau menerima karena mengharapkan ada dana yang diberikan oleh negara-negara UE seperti yang diberlakukan terhadap Yunani.⁴⁵ Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan bahwa negaranya memiliki kewajiban sejarah untuk menerima pengungsi. Banyaknya pengungsi yang berusia produktif juga menjadi alasan Jerman, Perancis dan Swedia menerima pengungsi.

Hungaria pada awalnya juga membuka perbatasannya untuk para migran sambil berharap bahwa gelombang pengungsi akan mengalir ke negara lain, tapi kemudian menutup perbatasannya dengan pagar kawat berduri ketika ternyata negaranya sudah kewalahan dalam menangani pengungsi. Tindakan sepihak oleh negara-negara seperti Hungaria dan Yunani yang tidak siap menerima pengungsi bahkan untuk transit sekalipun membuat jalur pengungsi semakin tidak terkontrol.⁴⁶ Situasi ini kemudian menjadi masalah besar bagi Uni Eropa karena harus tetap menerima pengungsi tetapi beberapa negara menolak kehadiran pengungsi sehingga banyak pengungsi yang secara ilegal masuk ke beberapa negara untuk mencari perlindungan dan tempat untuk tinggal.

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh "*Pew Research Center*" untuk 10 negara anggota Uni Eropa pada tahun 2016, masyarakat dari beberapa negara seperti Hungaria, Italia dan Polandia merasa bahwa adanya pengungsi dari Suriah menjadi ancaman utama bagi mereka, hal ini juga diakibatkan oleh orientasi politik pada negara-negara tersebut. Demikian pula bagi pejabat pemerintah yang

⁴⁵*Ibid* .hlm. 6

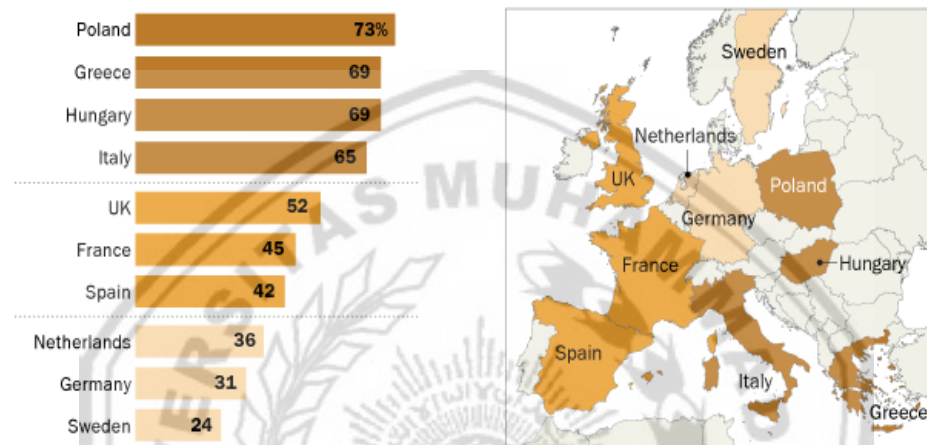
⁴⁶*Ibid*. Hlm 7

anti terhadap kebijakan penerimaan pengungsi berpendapat bahwa pengungsi merupakan ancaman bagi negara mereka.⁴⁷

Gambar 2.2 pendapat beberapa negara tentang pengungsi Suriah

Many Europeans see refugees from Syria and Iraq as a major threat

% saying large number of refugees leaving Iraq and Syria is a major threat to their country



Source: Spring 2016 Global Attitudes Survey.

PEW RESEARCH CENTER

Sumber : Pew Research Center

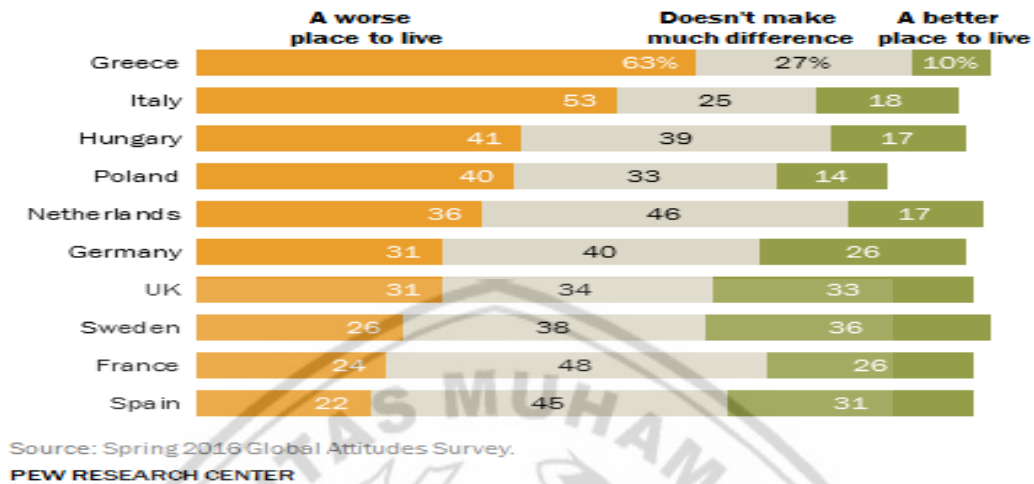
Kemudian negara-negara yang menolak pengungsi ini seperti Italia dan Yunani berpendapat bahwa meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki perbedaan ras, suku dan bangsa menjadikan negara mereka tempat yang buruk untuk hidup.⁴⁸

⁴⁷Pew Research Center, European Opinions of The Refugee Crisis in 5 Charts, diakses dari <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/> pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 12.30

⁴⁸*Ibid.*

Gambar 2.3 Pendapat Beberapa Negara Mengenai Dampak

Pengungsi



Sumber : Pew Research Center

Berdasarkan beberapa hasil survey tersebut, pengaruh masuknya beberapa pengungsi di negara-negara tersebut menjadikan masyarakat merasa terancam. Masyarakat merasa kurang aman dan perbedaan suku serta etnis menjadi alasan utama masyarakat menolak kehadiran pengungsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hungaria, Polandia dan Italia menolak masuknya pengungsi di negaranya.

Uni Eropa kemudian harus mencari cara untuk menampung pengungsi yang lebih banyak dan mencari rute lain, karena rute yang tersebut sudah tidak dapat dilewati oleh pengungsi karena beberapa negara yang telah menutup perbatasan tersebut. Kemudian negara-negara Balkan pada akhirnya menjadi rute alternatif bagi pengungsi dan menjadi tempat penampungan sementara bagi pengungsi sebelum ke negara tujuan. Berlakunya jalur alternatif bagi pengungsi menjadikan sejumlah negara di semenanjung Balkan bekerja ekstra keras untuk

menerima pengungsi dalam jumlah besar, misalnya Turki yang kemudian menjadi tempat penampungan pengungsi, Slovenia, Austria, dan Albania.⁴⁹ Rute baru ini kemudian disebut “*The Western Balkan Route*” yang kemudian menjadikan rute pengungsi dari Suriah, kemudian melewati Albania, Montenegro, Slovenia, Austria, Jerman, Perancis dan Swedia.⁵⁰

Gambar 2.4 Rute Alternatif Setelah Beberapa Negara Menutup Perbatasannya



Sumber : www.dw.com

Kebijakan Albania membuka negaranya sebagai negara transit bagi pengungsi Suriah merupakan strategi politik bagi Albania untuk menunjukkan eksistensinya pada Uni Eropa. Kedudukan Albania sebagai negara kandidat Uni Eropa yang diberikan pada tahun 2014 menjadikan langkah Albania untuk

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰DW Akademie, *Eropa Korban Yunani Dalam Krisis Pengungsi*, diakses dari <http://www.dw.com/id/eropa-korbankan-yunani-dalam-krisis-pengungsi/a-19105742> pada tanggal 8 Desember 2017 pukul 13.30

menjadi anggota resmi Uni Eropa semakin dekat.⁵¹ Untuk mencapai itu, Albania melakukan upaya-upaya diantaranya dengan membuka negaranya bagi pengungsi Suriah. Upaya tersebut dilakukan atas dasar kepentingan ekonomi seperti pasar bebas, kerjasama perdagangan serta terbukanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Albania. Selain itu kepentingan politik Albania yaitu untuk menjadi negara yang menganut nilai-nilai demokrasi seperti anti korupsi, politik yang jujur dan adil dan kebebasan hak asasi manusia. Kebijakan serta upaya yang dilakukan oleh Albania akan dijelaskan lebih dalam pada bab selanjutnya.

2.2 Albania Pasca Reformasi

Republik Albania merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan laut Adriatik dan Laut Ionian, kemudian di selatan berbatasan langsung dengan Yunani dan Montenegro serta Kosovo di utara.⁵² Ibu Kota Albania adalah Tirana. Sistem pemerintahan Albania yaitu Parlemen. Oleh karena itu saat ini Albania dipimpin oleh perdana menteri. Perdana menteri Albania saat ini adalah Edi Rama yang berasal dari partai Sosialis. Albania juga dijuluki *Shqipëria* yang berarti “Tanah Air Burung Elang”. Maksud elang tersebut juga dapat kita lihat pada bendera Albania yaitu elang berkepala dua.⁵³ Albania mendeklarasikan kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1912,

⁵¹European Commission, 2014, *Reporter From The Commission To The Council and The European Parliament on Albania's Progress in the Fight Against Corruption and Organised Crime and in the Judicial Reform*.

⁵²Index Mundi, Albania Location, diakses dari <https://www.indexmundi.com/albania/location.html> pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 22.00

⁵³Index Mundi, Albania Country Name, diakses dari https://www.indexmundi.com/albania/country_name.html pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 22.30

kemudian ditaklukkan oleh Italia pada tahun 1939 dan diduduki oleh Jerman pada tahun 1943. Kemudian partisan komunis mengambil alih negara ini pada tahun 1944.⁵⁴

Gambar 2.5 Peta Albania



Sumber :legacy.lib.utexas.edu

Era komunis di Albania berjalan selama 47 tahun dimulai sejak tahun 1944 sampai dengan 4 Juni 1991. Awal mula komunisme ditandai oleh jatuhnya kekuasaan Albania ditangan Enver Hoxha yang kemudian memimpin Albania sejak tahun 1944 sampai dengan tahun 1985. Pada masa pemerintahan Hoxha, Albania bagaikan sebuah penjara besar karena Albania yang mengisolasi negaranya dari dunia luar. Hoxha menerapkan *Self-Relience Policy* dimana

⁵⁴Index Mundi.Loc.Cit

Albania menutup diri dari dunia luar baik dalam segi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hingga Albania saat itu tak dianggap sebagai sebuah negara oleh dunia bahkan saat *Cold War*.

Sistem pemerintahan saat era komunisme ini diatur oleh satu-satunya partai yang ada yaitu *Party of Labour of Albania (PLA)*. Parlemen melakukan pertemuan selama 2 kali dalam setahun untuk menyetujui keputusan atau kebijakan yang telah di buat oleh partai. Pada masa ini, masyarakat dibatasi kebebasan pendapatnya, kebebasan informasi (media, literatur, seni), kebebasan dalam hak kepemilikan properti, aktivitas pribadi bahkan Hoxha membunuh ribuan pemberontak dan menghukum mati atau penjara seumur hidup bagi masyarakat Albania yang mencoba untuk kabur dari negaranya karena tindakan tersebut dianggap sebagai pengkhianatan besar terhadap negara.

Selain itu, dalam ranah hubungan internasional, Albania bahkan memutuskan hubungan dengan Uni Soviet pada tahun 1960 dan memutuskan hubungan dengan China pada tahun 1970 karena China mulai bekerjasama dengan AS, sehingga Albania menilai bahwa Uni Soviet dan China sudah tidak dianggap lagi sebagai negara yang benar-benar komunis. Hoxha juga membangun 400.000 bunker sebagai antisipasi jika ada serangan dari luar.⁵⁵ Albania menganggap bahwa negara mereka dikelilingi oleh musuh-musuh sehingga dibutuhkan pertahanan yaitu dengan membangun bunker sebanyak mungkin yang tersebar di seluruh penjuru Albania baik di pantai, lapangan bahkan di gunung. Segala bentuk institusi keagamaan ataupun kepercayaan juga dilarang di Albania begitu juga hak

⁵⁵Mirela Bogelani & John Loughlin, 2007.*Albania and The European Union*, London : I.B Tauris, Hlm.21

untuk beragama. Padahal Albania merupakan negara yang dihuni oleh masyarakat yang menganut beberapa agama.

Setelah kejatuhan komunisme pada tahun 1991, masyarakat Albania berjuang menanggulangi isolasi dari ketertinggalannya. Selama masa transisi awal, pemerintah Albania melakukan pendekatan dengan pihak Barat dan membuka isolasi terhadap dunia internasional untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan memperkenalkan reformasi demokrasi. Pada tahun 1992 diadakan Pemilu multipartai yang kemudian dimenangkan oleh partai Demokratik. Hasil pemilu ini memunculkan tokoh baru yaitu Sali Berisha yang terpilih menjadi Presiden Albania. Berisha memulai program reformasi ekonomi dan demokrasi secara bertahap, namun kemudian gagal pada pertengahan tahun 1995 dikarenakan banyaknya penggelapan uang dan pajak yang dilakukan oleh perusahaan swasta di Albania walaupun Berisha telah mengikuti program dari Bank Dunia dan IMF.⁵⁶

Pada program reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Berisha, masyarakat cenderung enggan untuk menyimpan uang di Bank karena tidak adanya jaminan keamanan investasi dari pemerintah. Kemudian hal ini dijadikan peluang bagi beberapa pihak untuk membuat skema investasi dengan presentase imbal balik yang menguntungkan. Namun, pada tahun 1997 skema investasi ini mengalami kebangkrutan. Hal ini mengakibatkan pergolakan senjata hampir di seluruh bagian negeri Albania karena mengalami kerugian dari bangkrutnya skema investasi tersebut. Kemudian pemerintah dipulihkan dengan bantuan Uni

⁵⁶Zeffry Alkatiri. 2016, *Transisi Demokrasi Di Eropa Timur : Baltik, Jerman Timur, Rumania & Balkan*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 132

Eropa dan PBB dengan membentuk rekonsiliasi nasional untuk menuju pemilu 1997.

Perekonomian di Albania saat era komunisme secara keseluruhan sangat buruk karena adanya isolasi terhadap dunia internasional. Hal ini menyebabkan inflasi yang tinggi bahkan mencapai 50%. Kemudian setelah runtuhnya komunis, perekonomian mulai membaik, walaupun begitu Albania tetap menjadi salah satu negara paling miskin di Eropa. Menurut data dari bank Albania pada tahun 2009, pendapatan perkapita di Albania mencapai \$4,070 dan meningkat pada tahun 2010 menjadi \$4,200. Pada tahun 2010 perekonomian Albania meningkat karena adanya kerjasama dengan Uni Eropa mengenai ekspor-impor dan bergabungnya Albania dengan NATO⁵⁷.

Pada tahun 1998, Albania meratifikasi konstitusi baru lewat referendum yang menjamin kekuasaan hukum dan perlindungan hak dan kebebasan beragama. Selama masa transisi 1997-2002, struktur demokrasi diperkuat dan multipartai kembali dibentuk. Kemudian pada tahun 2002, Alfred Moisiu diangkat menjadi Presiden. Adanya pergantian kekuasaan ini diakibatkan oleh rekonsiliasi partai dalam membangun Parlemen.⁵⁸ Hal ini menjadi bukti perkembangan Albania menjadi negara yang lebih stabil dari segi politik sehingga berdampak baik bagi sisi demokrasi dan ekonominya.

Konflik utama yang terjadi di Albania lebih banyak disebabkan oleh benturan etnis. Hal ini disebabkan karena banyaknya etnis di Albania. Konflik benturan etnis yang terjadi antara etnis Yunani yang ada di Albania dan etnis

⁵⁷*Ibid.* Hlm. 140

⁵⁸*Ibid.* Hlm. 133

Albania yang ada di Yunani. Konflik ini terjadi sejak era komunisme. Pada tahun 1996 hubungan antara Albania dan Yunani mulai membaik ditandai dengan kedatangan menteri luar negeri Yunani dan Presiden Albania yang kemudian menandatangani “*Treaty of Friendship & Cooperation*”. Yunani juga membantu Albania dalam pendanaan infrastruktur & membantu veto Albania dalam proses keanggotaan di Uni Eropa.⁵⁹

Tabel 2.1 Etnis di Albania

Etnis	Nilai total dari populasi (%)
Albania	92,5
Gipsy	2,5
Yunani	1,8
Macedonian	0,4
Vlah	0,1
Total populasi	3,5 juta

Sumber : Mirela Bogelani & John Loughlin.2007.Albania & The European Union. London : I.B Tauris.

Mayoritas agama di Albania adalah muslim. Keberagaman agama di Albania tidak menimbulkan perpecahan atau konflik yang berarti. Hal ini dikarenakan tingkat kerukunan beragama di Albania sangat tinggi. Albania juga bergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Walaupun mayoritas masyarakat Albania bergama islam, hukum islam tidak diterapkan sebagai dasar

⁵⁹ Ibid, Hlm. 135

hukum di Albania. Hal ini dikarenakan toleransi terhadap umat beragama yang lain.⁶⁰

Tabel 2.2 Struktur Agama di Albania

Agama	Nilai dari total populasi (%)
Muslim	70
Orthodox	20
Katolik	10

Sumber : Mirela Bogelani & John Loughlin.2007.Albania & The European Union. London : I.B Tauris.

Sebagai negara yang telah bebas dari komunis, Albania memiliki banyak factor yang harus diperhatikan untuk menuju demokrasi yang sesungguhnya. Dalam segi politik, institusi pemerintahan masih sangat rapuh dan belum stabil. Pada 31 Januari 1991 diadakan pemilu pertama di Albania dimana 11 partai ikut serta untuk menduduki 250 kursi parlemen. Pemilu ini kemudian dimenangkan oleh partai buruh yang menduduki 75 persen kursi parlemen. Kemudian pada tahun 1992 dilakukan pemilu lagi yang dimenangkan oleh partai demokrat. Namun, pemilu pertama ini menuai banyak kritikan dari dunia internasional karena pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi. Banyaknya

⁶⁰Mirela Bogelani & John Loughlin, *Op Ci.*, Hlm.81

manipulasi suara, bentrok antar pendukung, *buying voter* dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tempat perhitungan akhir.⁶¹

Permasalahan yang diakibatkan oleh pemilihan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi adalah banyaknya orang-orang yang terpilih dengan *buying voters* dan lain sebagainya, pegawai yang bekerja dalam pemerintahan bukanlah orang yang benar-benar berkualitas karena pada dasarnya mereka dipilih dengan cara yang tidak bebas dan adil. Banyak partai yang memilih kandidatnya hanya berdasarkan materi, bukan kualitas. Mereka tidak menyadari kualitas kandidat sangat berpengaruh pula bagi kualitas dan citra partainya. Rendahnya kualitas kandidat yang terpilih untuk menduduki parlemen membuat lemah parlemen itu sendiri dan berpengaruh pada sistem pemerintahan yang tidak berjalan baik. Korupsi terjadi dimana-mana, karena jabatan hanya digunakan untuk meraih banyak uang yang tidak bisa mereka dapatkan saat era komunis. Kemudian dampak selanjutnya adalah munculnya tindakan kriminal yang terorganisir, korupsi dan lain-lain. Hal ini kemudian diperbaiki oleh Albania untuk menjadikannya layak menjadi anggota Uni Eropa.

Selain itu, sebagai negara yang menjalankan sistem pemerintahan komunis selama 47 tahun, sulit bagi Albania untuk menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru yaitu demokrasi. Masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai nilai-nilai demokrasi yang terbukti dengan banyaknya masyarakat miskin memilih kandidat yang membayar mereka daripada kandidat yang memiliki integritas. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dari masyarakat

⁶¹*Ibid.*

Albania yang hidup dalam kemiskinan dan kurangnya fasilitas pelayanan publik kepada masyarakat.⁶² Faktor-faktor diatas menjadikan kondisi Albania tidak berkembang menjadi lebih baik. Oleh karena itu dibutuhkan campur tangan dari organisasi internasional seperti Uni Eropa untuk membantu Albania dalam mengatasi permasalahan tersebut dan Albania dapat menjadi negara yang seutuhnya demokrasi seperti negara-negara di Eropa Barat. Sehingga setelah runtuhnya komunis, Albania mencoba untuk membangun negara demokrasi seutuhnya dengan bergabung dalam organisasi internasional dan dengan kerjasama bilateral atau multilateral. Pada tahun 2009 Albania bergabung dengan NATO dan mengajukan keanggotaan ke Uni Eropa untuk memperkuat posisi di Eropa.

Kejadian pada pemilu tahun 1991 dan 1992 menjadi perhatian Eropa yang menyebabkan Komisi Eropa pada tahun 2004 memberikan gertakan pada Albania untuk memperbaiki sistem pemilihan umum selanjutnya. Begitu juga NATO yang mengancam tidak akan memasukkan Albania sebagai anggota NATO apabila Albania tidak melakukan pemilu yang jujur dan adil. Akhirnya pada tahun 2004 Albania melaksanakan pemilu yang jujur dan adil karena koordinasi yang baik antar partai.⁶³

2.3 Kebijakan Perluasan Uni Eropa dan Proses Albania Menjadi Anggota Uni Eropa

Kerjasama yang dilakukan Uni Eropa dan Albania pertama kali pada tahun 1991 yaitu dengan membentuk “*The Stabilisation & Association Process*” untuk

⁶²*Ibid.* Hlm 91

⁶³*Ibid.* Hlm 95

negara Yugoslavia, Albania, Makedonia, Kroasia dan Bosnia yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan Uni Eropa. *Stabilisation and Association Process* (SAP) adalah kebijakan Uni Eropa terhadap Balkan Barat, yang dibentuk dengan tujuan untuk keanggotaan Uni Eropa. SAP menetapkan tujuan politik dan ekonomi yang umum meskipun evaluasi kemajuan didasarkan pada kemampuan negara sendiri.⁶⁴ SAP diluncurkan pada Juni 1999 dan diperkuat pada *Thessaloniki Summit* pada Juni 2003 yang mengesahkan *Thessaloniki Agenda* untuk Balkan Barat. Agenda tersebut merupakan landasan bagi kebijakan Uni Eropa untuk kawasan Balkan Barat⁶⁵ yang bertumpu pada:

1. Hubungan kontrak (*Bilateral Stabilization and Association Agreements*)
2. Hubungan perdagangan
3. Bantuan keuangan (Bantuan Pra-Akresi)
4. Kerjasama regional dan hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga⁶⁶

Negara-negara yang telah menandatangani perjanjian aksesori memperoleh status “negara-negara aksesori” dan diharapkan menjadi negara anggota penuh pada tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian. Selama periode interim, negara-negara tersebut mendapatkan manfaat dari pengaturan khusus, yaitu mereka terus diinformasikan tentang undang-undang Uni Eropa melalui prosedur informasi dan konsultasi serta diberi kesempatan untuk berpendapat, mereka mendapatkan status

⁶⁴European Commission, *European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations*, diakses dari https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/sap_en pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 15.30

⁶⁵ Gjergji Vurmo, 2008, *Relation of Albania With European Union*, Center of European Union Enlargement Studies

⁶⁶ Wim VanMeurs, *The Next Europe : Southern Europe Thessalonik*,. *Centrum für Angewandte Politikforschung*, Bartelismann Stiftung.

pengamat aktif di semua badan yang relevan, di mana mereka memiliki hak untuk berbicara tetapi tidak dapat memberikan suara atau hak *veto*.

Tujuan *Stabilization and Association Agreement* bagi Albania yaitu untuk mendukung Albania dalam usahanya untuk memperkuat demokrasi & supremasi hukum, berkontribusi dalam politik, ekonomi dan stabilitas institusi Albania termasuk juga stabilitas kawasan, menyediakan kerangka yang layak untuk dialog politik sekaligus mengembangkan kedekatan hubungan politik antar partai, mendukung usaha Albania dalam melengkapi transisi dalam pasar ekonomi fungsional, kemudian untuk mempromosikan hubungan ekonomi yang harmonis dan membangun kawasan perdagangan bebas antara komunitas dan Albania secara berkala yang pada intinya dapat meningkatkan kerjasama kawasan dalam seluruh bidang (ekonomi, politik, sosial-budaya, pariwisata dan teknologi-informasi).

Negara yang mencalonkan diri untuk keanggotaan Uni Eropa dapat diberikan status calon negara oleh Dewan Eropa atas dasar rekomendasi oleh Komisi Eropa. Adanya status negara kandidat tidak serta-merta memberikan hak untuk bergabung dengan Uni Eropa secara otomatis. Karena Komisi Eropa akan memeriksa aplikasi sesuai dengan *Copenhagen Criteria* kemudian Dewan Eropa akan membuka negosiasi dengan negara kandidat.

2.3.1 Persyaratan Menjadi Anggota Uni Eropa

Persyaratan untuk menjadi anggota ditetapkan oleh Dewan Eropa sesuai dengan *Copenhagen Criteria* dalam *Copenhagen Summit* pada tahun 1993 yang

menyatakan bahwa untuk menjadi anggota Uni Eropa, negara yang mengajukan harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki institusi yang stabil yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan menghargai perlindungan terhadap kaum minoritas
2. Memiliki fungsi pasar ekonomi yang berfungsi dan kapasitas untuk mengatasi kompetisi dan tekanan pasar Uni Eropa
3. Memiliki kapasitas untuk kewajiban terhadap keanggotaan termasuk ketaatan untuk objektif dalam politik, ekonomi dan serikat moneter, serta
4. Menghadapi *Acquis Communautaire* (dalam seluruh undang-undang Eropa) dan memastikan pelaksanaan yang efektif melalui struktur administratif dan peradilan yang tepat.⁶⁷

Acquis Communautaire adalah aturan yang akan mengikat anggota. Aturan ini akan terus berkembang dan terdiri dari prinsip-prinsip dan tujuan politik. Untuk keperluan negosiasi, kemudian aturan UE dibagi menjadi 31 bab yang akan diimplementasikan oleh negara calon anggota.⁶⁸

Tabel 2.3 *Acquis Communautaire*

<i>Acquis Communautaire</i>	
1.	Pergerakan Bebas terhadap Barang
2.	Pergerakan Bebas terhadap Manusia
3.	Kebebasan untuk Memberikan Pelayanan
4.	Pergerakan Bebas terhadap Modal

⁶⁷European Commission, *Albania 2010 Progress Report*, Hlm. 8

⁶⁸UNHCR, *The EU Enlargement Process and The External Dimension of the EU JHA Policy*, Hlm. 147

<i>Acquis Communautaire</i>	
5.	Hukum Perusahaan
6.	Kebijakan Persaingan
7.	Pertanian
8.	Perikanan
9.	Kebijakan Transportasi
10.	Perpajakan
11.	Persatuan Ekonomi dan Moneter
12.	Statistik
13.	Kebijakan Sosial dan Ketenagakerjaan
14.	Energi
15.	Kebijakan Industri
16.	Usaha Kecil dan Menengah
17.	Sains dan Penelitian
18.	Pendidikan dan Pelatihan
19.	Teknologi Telekomunikasi dan Informasi
20.	Kebijakan kebudayaan dan Audio-Visual
21.	Kebijakan Regional dan Koordinasi Instrumen Struktural
22.	Lingkungan
23.	Perlindungan Konsumen dan Kesehatan
24.	Kerjasama dalam Bidang JHA
25.	Bea Cukai Union

<i>Acquis Communautaire</i>	
26.	Hubungan Eksternal
27.	Kebijakan Umum Luar Negeri dan Keamanan (CFSP)
28.	Kontrol Keuangan
29.	Ketentuan Keuangan dan Anggaran
30.	Lembaga
31.	Lainnya

Sumber : UNHCR.*The EU Enlargement Process and The External*

Dimension of the EU JHA Policy.

Persyaratan pengajuan yang menganut lembaga yang demokrasi dan pasar ekonomi yang berfungsi adalah kunci bagi opini Uni Eropa sebagai awal dari negosiasi. Kemudian Dewan Uni Eropa akan memutuskan untuk membuka negosiasi tambahan atau menolak pengajuan tersebut. Setelah mendapatkan status sebagai negara kandidat, komisi Uni Eropa akan menyiapkan opini untuk diadopsi oleh negara kandidat. Walaupun negara kandidat telah memenuhi criteria, kesepakatan, pertimbangan dari negara-negara anggota juga diperlukan.

2.3.2 Perluasan Uni Eropa ke daerah Balkan

Kebijakan Uni Eropa untuk melakukan perluasan ke daerah Balkan dilakukan pasca terjadinya *Cold War*. Perbedaan orientasi politik antara Eropa bagian tenggara yang menganut sistem pemerintahan komunis seperti contohnya Albania dan bagian barat yang menganut sistem pemerintahan demokrasi seperti Perancis menjadikan Uni Eropa berkeinginan untuk menyatukan perbedaan dan

mendekatkan jarak antara Eropa bagian barat dan bagian Eropa yang lain.⁶⁹ Pada dasarnya, walaupun terdapat perbedaan sistem pemerintahan, mereka tetap merupakan bagian kesatuan dari Uni Eropa yang memiliki nilai, prinsip, dan tradisi yang hanya saja terpisahkan oleh sejarah masa lalu.

Seperti yang kita ketahui, Balkan merupakan wilayah dengan intensitas konflik yang tinggi. Adanya perbedaan etnis dan perebutan wilayah kekuasaan menjadikan wilayah Balkan terkenal akan panasnya konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Adanya konflik yang selalu terjadi di Balkan tentunya menjadi perhatian dunia khususnya Uni Eropa yang merupakan organisasi terbesar di Eropa. Konflik yang terjadi juga menyebabkan keadaan Eropa tidak akan stabil karena akan mempengaruhi stabilitas dan keamanan negara-negara disekitarnya yang sebagian besar telah menjadi negara anggota UE. Oleh karena itu, dengan melakukan perluasan di daerah Balkan, Uni Eropa dapat membantu menangani masalah yang terjadi serta mengembangkan negara-negara di daerah Balkan menjadi lebih baik dalam segi sistem pemerintahan maupun ekonomi karena dapat menjadi pasar yang potensial untuk barang, pelayanan, buruh dan tenaga ahli profesional karena Balkan mempunyai presentase usia muda yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara Eropa lainnya.

Selain itu, perluasan merupakan bentuk kebaikan hati dari Uni Eropa kepada negara-negara yang telah bebas dari sistem pemerintahan komunis. Proses perluasan tersebut dilakukan sejak tahun 1990 dan perluasan ke wilayah Balkan merupakan perluasan ke-5 dalam Uni Eropa. Dalam 1 dekade, prospek untuk

⁶⁹*Ibid.* Hlm. 83

menjadi anggota Uni Eropa kedepannya diarahkan untuk memperkuat dan dapat menerima demokrasi, reformasi pasar dan transformasi masyarakat.⁷⁰ Dengan adanya perluasan ini, kedepanya Eropa menjadi lebih besar dan beragam. Pada proses perluasan ini, Uni Eropa juga mendapat tantangan dari beberapa negara anggotanya yang menganggap bahwa memasukkan negara miskin dalam keanggotaan Uni Eropa akan menambah tekanan, apalagi setelah melakukan 2 kali ekspansi berturut-turut dari 12 negara anggota menjadi 25 negara anggota.⁷¹ Walaupun begitu, Javier Solana sebagai dewan tertinggi Uni Eropa menyatakan bahwa dengan memperluas Uni Eropa ke daerah Balkan merupakan strategi yang tepat dan UE berkomitmen akan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam proses perluasan anggota tersebut. Contohnya seperti Albania sebagai negara yang belum stabil pasca komunis baik dari segi politik maupun ekonomi.

2.3.3 Proses Albania Menjadi Negara Kandidat Uni Eropa

Negara yang mencalonkan diri untuk keanggotaan Uni Eropa dapat diberikan status negara kandidat oleh Dewan Eropa atas dasar rekomendasi oleh Komisi Eropa. Adanya status negara kandidat tidak serta-merta memberikan hak untuk bergabung dengan Uni Eropa secara otomatis. Karena Komisi Eropa akan memeriksa aplikasi sesuai dengan *Kopenhagen Criteria* kemudian Dewan Eropa akan membuka negosiasi dengan negara kandidat. Adapun proses Albania dalam keanggotaan Uni Eropa.

⁷⁰*Ibid.* Hlm 85

⁷¹*Ibid.* Hlm 67

Tabel 2.4 Proses Albania menjadi negara kandidat Uni Eropa

Tanggal	Proses	Keterangan
1 Juni 2004	Albania memulai kemitraan dengan Uni Eropa	
12 Juni 2006	Penandatanganan Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi serta Perjanjian Sementara	Mulai berlaku pada 1 Desember 2006. Penandatanganan perjanjian <i>Stabilisation and Association Agreement</i> (SAA) dilaksanakan dalam agenda <i>General Affairs and External Relation Council</i> di Luxembourg, Belanda ⁷² .
1 Januari 2007	<i>Instrument of Pre-Accession Assistance</i> (IPA) memberikan bantuan dana untuk Albania dalam mempersiapkan keanggotaan Uni Eropa	IPA merupakan program bantuan baru untuk kandidat & potensial kandidat Uni Eropa. Bantuan ini akan diberikan mulai tahun 2007 sampai 2013. ⁷³ Konsen bantuan IPA yaitu :Bantuan Transisi & Pembangunan Lembaga/Institusi, Kerjasama Lintas Perbatasan, Pengembangan Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan & Pembangunan Pedesaan. Bantuan yang didapatkan oleh Albania adalah bantuan untuk pembangunan lembaga/institusi sebanyak 186.3 juta

⁷²Mirela Bogelani & John Loughlin, *Op.Cit.* Hlm. 80

⁷³Darjel Sina, 2015, *The Relationship Between Albania and European Union*, Lector at European University of Tirana, Hlm. 512

Tanggal	Proses	Keterangan
		<p>€. Poin kedua yaitu kerjasama lintas perbatasan sebanyak 26.6 juta €. ⁷⁴</p> <p>Jumlah bantuan 212.9 juta € tersebut diberikan sesuai perencanaan yang dilakukan oleh otoritas Albania dan Komisi Eropa di Tirana</p>
1 Januari 2008	<p>Persetujuan Fasilitasi Visa UE-Albania diberlakukan sesuai dengan “<i>Visa Facilitation Agreement</i>” yang telah ditandatangani pada 13 April 2007 di Zagreb.</p>	<p>Perjanjian ini sangat penting bagi masyarakat Albania karena dapat menghubungkan masyarakat Albania dengan masyarakat di negara anggota Uni Eropa. Perjanjian ini meliputi tarif visa yang rendah dan prosedur aplikasi yang disederhanakan bagi masyarakat Albania seperti pelajar, pengusaha, jurnalis, peneliti, perwakilan masyarakat sipil, dan lain-lain.</p>
1 April 2009	<p><i>Stabilisation and Association Agreement</i> mulai diberlakukan</p>	<p>Pada bulan yang sama pada 24 April 2009 Albania mengajukan keanggotaan Uni Eropa. Kemudian, pengajuan ini disetujui oleh Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada tanggal 16 November 2009</p>
15 Desember 2010	<p>Bebas visa untuk masyarakat Albania dikabulkan oleh Parlemen dan Dewan Eropa</p>	<p>Visa ini diaplikasikan untuk pemegang paspor biometrik yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Schengen</p>

⁷⁴*Ibid.* Hlm.519

Tanggal	Proses	Keterangan
1 Februari 2011	Pembentukan “ <i>Action Plan</i> ”	“ <i>Action Plan</i> ” didesain untuk membahas 12 prioritas utama yang diidentifikasi dalam opini Komisi Eropa yang akan diadopsi oleh Albania dalam aplikasi keanggotaan Uni Eropa
27 Juni 2014	Dewan Eropa memberikan status negara kandidat Uni Eropa ke Albania	

Sumber : eeas.europa.eu

Dewan Eropa mulai membahas status negara kandidat Uni Eropa ke Albania pada tanggal 16 Oktober 2013. Kemudian Komisi Eropa mengeluarkan laporan tahunan untuk kemungkinan keanggotaan Uni Eropa yang didalamnya termasuk laporan pemilu Albania yang mengalami kemajuan. Selanjutnya kemajuan Albania tersebut dibahas dalam pertemuan *Member of the European Parliament* (MEP) pada tanggal 5 Desember 2013 yang membahas mengenai rekomendasi Albania untuk menjadi anggota Uni Eropa. MEP merekomendasikan kepada dewan untuk mengakui kemajuan yang telah dibuat oleh Albania dengan mengabulkan status negara kandidat Uni Eropa tanpa penundaan. Walaupun begitu, beberapa negara seperti Denmark dan Netherland tetap tidak ingin menyetujui status tersebut. Konsekuensinya, Dewan Uni Eropa dalam pertemuan 13 Desember 2013 setuju untuk menunda keputusan mengenai status kandidat Albania hingga Juni 2014. Pada Juni 2014, Dewan Eropa setuju untuk mengabulkan status kandidat Uni Eropa yang telah disahkan oleh pemerintah

Yunani tahun 2004 sebagai bagian dari *EU-West Balkan Summit* di Thessaloniki untuk mempercepat integrasi dari semua negara Balkan Barat ke dalam Uni Eropa.⁷⁵ Perkembangan Albania tersebut juga tidak lepas dari poin-poin yang terdapat pada “*Action Plan*” yang telah disepakati oleh Albania dan Uni Eropa pada tahun 2011.⁷⁶

Tabel 2.5 poin-poin *Action Plan* untuk Albania

No.	<i>Action Plan for Albania</i>
1.	Menjamin fungsi yang tegas dari parlemen berdasarkan dialog politik yang konstruktif dan berkelanjutan antara semua partai politik
2.	Mengadopsi undang-undang yang diperkuat parlemen
3.	Menunjuk Ombudsman dan menjamin proses pemungutan suara serta kebebasan bersuara dalam parlemen dalam penunjukkan konstitusi dan pengadilan tinggi
4.	Memodifikasi kerangka legislatif untuk pemilu berdasarkan garis rekomendasi OSCE-ODIHR
5.	Menjamin pemilihan yang diselenggarakan sesuai dengan uni Eropa dan standar internasional
6.	Pembentukan badan administrasi publik. Tahap-tahap penting dijalankan untuk pembentukan administrasi publik termasuk mengubah pelayanan hukum sipil dan memperkuat badan administrasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas sebagaimana ditingkatkannya promosi

⁷⁵European Commission 2014, *Op.Cit*Hlm. 225

⁷⁶European Commission.2012, *European Commission Albania 2012 Progress Report*, Hlm.6

No.	<i>Action Plan for Albania</i>
	dan penunjukkan yang didasarkan pada transparansi dan manfaatnya
7.	Memperkuat supremasi hukum yang diadopsi dan diimplementasikan dengan pembentukan strategi untuk menjamin kebebasan, efisiensi dan akuntabilitas dari institusi pengadilan/kehakiman
8.	Strategi anti korupsi dan <i>Action Plan</i> . Implementasi pemerintahan yang anti korupsi secara efektif, menghilangkan hambatan-hambatan dalam investigasi, keterangan-keterangan hakim, menteri-menteri dan anggota parlemen. Membangun jejak investigasi yang proaktif dan keyakinan jaksa penuntut umum dalam kasus-kasus korupsi pada semua level
9.	Berjuang melawan kejahatan yang terorganisir. Untuk meningkatkan perlawanan terhadap kejahatan yang terorganisir dengan cara investigasi proaktif, meningkatkan kerjasama dengan <i>partner</i> di kawasan dan Uni Eropa serta koordinasi dengan lembaga penegak hukum
10.	Strategi dan <i>Action Plan</i> dalam hak kepemilikan. Menyiapkan, mengadopsi dan mengimplmentasikan strategi nasional dan <i>Action Plan</i> dalam hak kepemilikan
11.	Menjamin perlindungan hak asasi manusia. Melakukan tahap-tahap konsentrasi untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia terutama perempuan, anak-anak dan Roma untuk implelementasi kebijakan anti deskriminasi secara efektif
12.	Meningkatkan perlakuan terhadap tahanan

Jika Albania dapat mengimplementasikan poin-poin yang telah disepakati tersebut, maka Albania dapat meneruskan proses untuk menjadi negara anggota Uni Eropa. Poin-poin tersebut akan mengarahkan Albania untuk menjadi negara yang siap baik dari segi ekonomi dan politik, sehingga ketika telah resmi menjadi negara anggota Uni Eropa, Albania dapat beradaptasi dengan kebijakan dan aturan-aturan dari Uni Eropa.

